



FOR IMMEDIATE RELEASE

**Contact:**

Fabby Tumiwa  
Executive Director, IESR  
(+6221) 22323069  
[iesr@iesr.or.id](mailto:iesr@iesr.or.id)

Gandabhaskara Saputra  
Communications Coordinator, IESR  
(+6221) 22323069 (M). 081235563224  
[ganda@iesr.or.id](mailto:ganda@iesr.or.id)

## Indonesia sedang Bermain-main dengan Krisis Iklim

***Respon IESR terhadap pidato Wakil Presiden (Jusuf Kalla) di KTT PBB Iklim (UN Climate Action Summit) di New York, USA***

***"Kita sedang dalam keadaan darurat iklim. Kebakaran hutan dan lahan yang telah terjadi di beberapa daerah di Sumatera dan Kalimantan semakin memburuk sebagai dampak dari perubahan iklim. Indonesia sudah melakukan beberapa pendekatan untuk mengatasi tantangan yang sangat besar ini, untuk meningkatkan kapasitas adaptasi dan mitigasi demi meningkatkan ambisi perubahan iklim, untuk melakukan aksi iklim yang konkrit dan realistis untuk dapat dilakukan saat ini."***

Sebagai *think tank* yang memiliki fokus dalam melakukan advokasi percepatan transisi energi di Indonesia, IESR ingin merespon pidato Wakil Presiden (Jusuf Kalla) di KTT PBB Iklim (UN Climate Action Summit) di New York, USA pada Senin, 23 September 2019.

IESR menghargai Indonesia kembali menegaskan komitmen target penurunan emisi (29% dan 41%) sebagaimana telah dituliskan dalam dokumen *Nationally Determined Contributions* (NDC) Indonesia yang disampaikan pada 2016. Selain itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla menyebutkan tentang *Low Carbon Development Initiative* yang diluncurkan awal tahun ini oleh Bappenas. Tentang aksi mitigasi, Bapak Wakil Presiden menyatakan ada dua tindakan: pertama, solusi berbasis alam yang mencakup mengembalikan 2 juta ha lahan gambut dan merehabilitasi 12 juta ha lahan kritis pada 2030 serta melestarikan dan memulihkan hutan bakau dan pesisir; kedua, transisi energi berfokus pada penghapusan subsidi bahan bakar fosil, kebijakan mandatori biodiesel dan pengembangan kilang bahan bakar nabati.

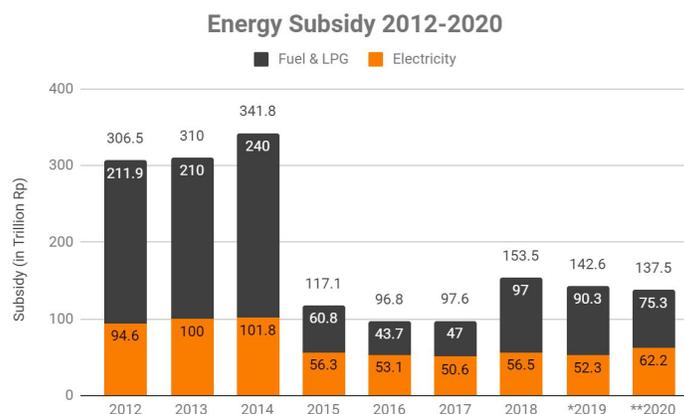
IESR ingin menekankan bahwa pada dasarnya tidak ada yang baru dalam pidato Bapak Wakil Presiden, khususnya, dalam isu energi yang terkait dengan aksi mitigasi perubahan iklim. Selain itu, sebagian besar dari paparan telah dijelaskan dalam beberapa forum internasional seperti Osaka G20 Summit and Abu Dhabi Climate Meeting. Ini menunjukkan bahwa Indonesia belum siap untuk meningkatkan ambisinya dalam mengatasi krisis iklim. Upaya Indonesia saat ini dalam menanggulangi krisis iklim hanya didasarkan pada komitmen NDC Indonesia.

Bertentangan dengan kepercayaan pemerintah bahwa NDC Indonesia cukup ambisius, penilaian dari Climate Action Tracker (CAT) telah menilai target NDC kita tidak cukup untuk memenuhi target *Paris Agreement* dan sejauh ini tidak ada indikasi bahwa jalur yang diambil Indonesia akan mencapai emisi bersih nol. Diperkirakan bahwa, pada tahun 2100, skenario BAU di NDC Indonesia akan berada di jalur 4°C dan 3°C dengan skenario bantuan internasional<sup>1</sup>. Ini menyiratkan bahwa Indonesia membutuhkan aksi mitigasi iklim yang lebih ambisius untuk menunjukkan komitmennya dalam meratifikasi *Paris Agreement*; dan aksi ini harus ditekankan lebih banyak di sektor energi karena proyeksi emisi dari sektor energi Indonesia diperkirakan akan menjadi dominan pada tahun 2030.

Sebagai bagian dari kegiatan Climate Transparency dalam meningkatkan ambisi negara-negara G20 dalam mengatasi krisis iklim, IESR bersama dengan mitra negara lain merekomendasikan hingga tiga aksi mitigasi kepada pemerintah negara-negara G20<sup>2</sup>. Untuk Indonesia, IESR merekomendasikan tiga aksi: transisi batubara, efisiensi energi, dan moratorium pembukaan hutan secara permanen<sup>3</sup>.

Komitmen Indonesia untuk melakukan transisi energi terbilang sangat lemah. Meskipun pemerintah telah berusaha mengurangi subsidi bahan bakar fosil, tetapi jumlah subsidi setiap tahunnya masih tinggi baik untuk listrik maupun bahan bakar (Gbr. 1). Selain itu sejak 2018, pemerintah memperkenalkan DMO untuk batas harga batubara yang secara harfiah mensubsidi penggunaan batubara PLN. Apabila pemerintah serius dalam meningkatkan ambisi iklimnya, subsidi bahan bakar (listrik, BBM, batubara) harus dialihkan untuk mendukung pengembangan energi terbarukan sebagai contoh menyediakan cicilan suku bunga rendah untuk kredit panel atap surya atau mendukung pertumbuhan industri pembangunan terbarukan lokal.

**Figure 1. Energy Subsidy 2012-2020**



Sumber: Kementerian Keuangan dalam Investor Daily

(<https://investor.id/business/dua-faktor-sebabkan-target-alokasi-subsidi-energi-2020-diturunkan>)

Dalam aspek biodiesel, pendekatan ini hanya memiliki efek yang terbatas pada penurunan emisi karena hanya mengganti 4 hingga 6 juta kilo liter diesel. Implementasi di luar B30 masih belum dapat dipastikan dari aspek teknisnya walaupun pemerintah memiliki target yang ambisius untuk menerapkan B30 pada tahun 2025. IESR melihat bahwa pengembangan kilang minyak nabati sebagai salah satu jalan melakukan transisi energi, yang telah disebutkan beberapa kali oleh pemerintah, sebenarnya masih perlu waktu untuk dikembangkan dan masih ada ketidakpastian penetapan harga bahan bakar untuk biofuel di masa depan. Meskipun demikian, aspek keberlanjutan

<sup>1</sup> <https://climateactiontracker.org/countries/indonesia/>

<sup>2</sup> <https://www.climate-transparency.org/call-for-more-ambition-ahead-of-the-un-climate-action-summit>

<sup>3</sup> <http://iesr.or.id/pustaka/the-ambition-call-indonesia/>

dan jejak karbon yang menentukan emisi bersih dari produk biofuel adalah faktor penting untuk menentukan apakah peningkatan penggunaan biofuel merupakan solusi yang efektif untuk iklim.

Secara keseluruhan, komitmen Indonesia pada aksi iklim dinilai kurang ambisius oleh IESR. Kami yakin bahwa Indonesia dapat berbuat lebih banyak di bidang reformasi subsidi bahan bakar fosil, pengembangan energi terbarukan dalam listrik dan bahan bakar terbarukan di sektor transportasi, dan melakukan perencanaan untuk beralih dari pembangkit listrik tenaga batubara. IESR mengharapkan bahwa ketika pemerintahan baru sudah dilantik pada bulan Oktober, langkah-langkah ambisius dan komitmen yang lebih kuat dapat dibuat dalam COP 25 di Chili, Argentina. Kami bersedia bekerja dengan, serta membantu, pemerintah untuk meningkatkan ambisi iklimnya berdasarkan ilmu pengetahuan terbaik dan kemajuan teknologi terbaik yang telah ada sambil mempertahankan daya saing ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

Jakarta, 25 September 2019

### **Tentang IESR**

*Institute for Essential Services Reform* adalah institusi riset dan advokasi di bidang energi dan kebijakan lingkungan. Institusi kami mengkombinasikan studi mendalam, menganalisa kebijakan, undang - undang, dan aspek tekno-ekonomi pada sektor energi dan lingkungan dengan aktifitas advokasi kepentingan umum yang kuat untuk mempengaruhi perubahan kebijakan pada skala Nasional, sub-bangsa dan dunia. Untuk Informasi lebih lanjut silahkan kunjungi laman [www.iesr.or.id](http://www.iesr.or.id) atau ikuti [Facebook](#) dan [Twitter](#) kami.